

**DAMPAK PENGADAAN TANAH TERHADAP PERUBAHAN
PENGUNAAN TANAH DAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT
(Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Kereta Api
di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

NURUL AZMY D. TANTJA

NIT. 17263034/PERPETAAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEALIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masaah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Literatur	7
B. Kerangka Teoritis.....	9
1. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	9
2. Perubahan Penggunaan Tanah	12
3. Kondisi Sosial	13
C. Kerangka Pemikiran	15
D. Pertanyaan Penelitian	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Metode Penelitian	19

B. Lokasi Penelitian.....	19
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan	20
D. Definisi Operasional Konsep	20
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	21
F. Teknik Analisis Data	22
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	24
A. Gambaran Fisik Wilayah Penelitian	24
B. Gambaran Umum Kependudukan Kecamatan Tanete Rilau	25
C. Gambaran Umum Penggunaan Tanah.....	26
BAB V ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN DAMPAK	
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	27
A. Penggunaan Tanah Tahun 2015 dan Tahun 2021	27
1. Penggunaan tanah tahun 2015.....	27
2. Penggunaan tanah tahun 2021.....	38
3. Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2015-2-2021 di Lokasi	
Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Kereta Api ...	49
B. Dampak Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Lingkungan Di	
Sekitarnta.....	51
BAB VI DAMPAK SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK	
PEMBANGUNAN GUDANG KERETA API.....	57
A. Dampak Komunitas.....	57
B. Dampak Individu dan Keluarga	58
C. Dampak Kebutuhan Infrastruktur.....	60
BAB VII PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program utama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur maka diperlukan tanah sebagai wadah untuk melakukan pembangunan. Tanah yang digunakan dapat berupa tanah negara bebas maupun tanah negara yang sudah ada haknya. Ketersediaan tanah negara “bebas” meliputi tanah yang sama sekali belum memiliki hak di atasnya atau diduduki oleh orang atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya sangatlah terbatas (Sitorus 2004, 1). Keterbatasan akan tanah ini yang mengharuskan pemerintah menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan melalui kegiatan pengadaan tanah.

Pengadaan tanah merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah. Semakin maju suatu masyarakat maka akan semakin banyak pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan umum. Apabila hak atas tanah milik individu dihadapkan pada kegiatan untuk kepentingan umum maka kepentingan umumlah yang harus didahulukan (Zakie 2011, 189). Pemerintah berhak mendapatkan tanah untuk kepentingan umum akan tetapi harus menghormati hak warga negara masyarakat (Sitorus dan Limbong 2004, 1). Oleh karena itu pemerintah mengatur proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pelaksanaan pengadaan tanah memberikan berbagai pengaruh terhadap masyarakat baik masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Risnawati (2011) mengemukakan bahwa dengan adanya pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Hertasing Baru Makassar mendorong semakin lancarnya aksesibilitas pada daerah atau kawasan sekitarnya sehingga mendukung terjadinya pembangunan pada kawasan tersebut. Selanjutnya menurut Handayani dkk.

(2016), pengadaan tanah memberikan pengaruh positif terhadap kondisi masyarakat terdampak pengadaan tanah Jalan Tol Surabaya-Mojokerto. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut diketahui bahwa dengan adanya pengadaan tanah akan berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat yang berupa peningkatan aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan psikologis. Namun demikian, pengadaan tanah tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat. Menurut kajian yang dilakukan oleh Marlianawati, dkk (2019) menyebutkan bahwa masyarakat yang akan tanah sebagai lokasi pembangunan ini mengakibatkan masyarakat harus mengalami pengusuran dan terpaksa harus meninggalkan tanahnya sebagai ganti pembangunan fasilitas umum.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah yang menjadi lokasi pembangunan infrastruktur, yaitu dengan dibangunnya infrastruktur sarana dan prasarana Kereta Api Makassar – Parepare. Menurut Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan, dengan adanya Kereta Api Makassar Parepare akan meningkatkan konektivitas antar daerah dan perekonomian akan maju. Selain itu Kereta Api Makassar-Parepare diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang terjadi dan menekan biaya pengiriman di Pulau Sulawesi. Kereta api ini nantinya tidak hanya digunakan untuk mengangkut penumpang, akan tetapi juga akan digunakan untuk angkutan komoditi lainnya (Kompas 26 November 2018). Salah satu daerah yang dilakukan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api adalah Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

Objek pengadaan tanah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana Kereta Api Makassar-Parepare sebagian besar merupakan lahan pertanian. Pembangunan ini berdampak pada perubahan fungsi lahan pertanian menjadi rel kereta api, gudang maupun stasiun. Pembangunan yang memaksa alih fungsi lahan tentu saja berpengaruh terhadap perubahan lingkungan di sekitar lokasi tersebut. Selain mengakibatkan hilangnya lahan pertanian milik masyarakat, dampak lain yang ditimbulkan oleh aktivitas alih fungsi lahan tersebut diantaranya berupa terjadinya banjir yang melanda lokasi tersebut.

Akibatnya kondisi ini mendorong semakin berkurangnya lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat (Darwis 2020). Dengan demikian banyak petani yang akan kehilangan tanah pertaniannya sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi.

Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana Kereta Api Makassar-Parepare mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan tanah. Berdasarkan hasil observasi, perubahan penggunaan tanah tidak hanya terjadi di sepanjang koridor rel kereta api, namun juga terjadi di sekitar daerah pembangunan. Diketahui bahwa saat ini bidang-bidang pertanian yang berada di sekitar salah satu lokasi pembangunan stasiun telah dialih fungsikan menjadi tanah non pertanian berupa kavling untuk pembangunan perumahan baru. Rencana pembangunan perumahan pada lahan yang semula merupakan tanah pertanian tersebut rupanya menarik minat masyarakat terutama di tengah tingginya kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal. Tidak hanya pada lokasi pembangunan tetapi juga mempengaruhi keadaan di sekitar lokasi tersebut. Akibatnya, alih fungsi lahan pertanian yang kemudian diikuti dengan pembangunan pemukiman memicu terjadinya kenaikan harga lahan (Masykuroh dan Rudianto 2016). Harga tanah pertanian jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan harga tanah non pertanian sehingga sangat menggoda para pemilik lahan untuk melakukan alih fungsi (Lestari 2019). Jika tidak segera diatasi, meningkatnya alih fungsi lahan ini akan menimbulkan dampak negatif seperti polusi udara, dan berkurangnya daerah resapan air yang dapat mengakibatkan banjir (Risnawati 2011). Perubahan penggunaan tanah di sekitar daerah pembangunan tidak terlepas dari pengaruh penduduk, aksesibilitas, prasarana dan sarana, daya dukung lahan, ekonomi dan kebijakan pemerintah (Tambajong, dkk 2016)

Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum juga akan mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Secara umum, pengadaan tanah akan membawa perubahan yang terjadi pada masyarakat pedesaan yang mulai mengenal transportasi dan komunikasi modern (Darwis 2020). Perubahan sosial yang disebabkan oleh perkembangan teknologi ataupun pembangunan

secara alamiah maupun terencana tentunya akan mengubah perilaku masyarakat. Pada dasarnya pembangunan dimaksudkan untuk menuju keadaan yang lebih baik dan berjalan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat (Miswanto dan Safaat 2018), oleh sebab itu perubahan sosial merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi perubahan tersebut sering menjadi tak terkendali dan menimbulkan banyak permasalahan (Suryono 2020).

Selain mempengaruhi kondisi sosial, pembangunan infrastruktur juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat terdampak. Pembangunan melalui pengadaan tanah yang berasal dari tanah pertanian tentu saja menuntut adanya perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian bukanlah perkara sepele sebab sebagai sumber penghidupan masyarakat. Hilangnya lahan pertanian membawa implikasi yang kompleks bagi kehidupan sosial masyarakat. Hilangnya lahan pertanian dapat menyebabkan langkanya bahan pangan sehingga harga bahan pangan yang tersedia di pasaran semakin mahal. Sedangkan bagi petani yang kehilangan lahan pertaniannya berarti telah kehilangan lapangan pekerjaan sehingga terpaksa harus mencari penghidupan di sektor lain bahkan dapat mendorong terjadinya urbanisasi. Dampak lain yang juga dapat terjadi yaitu hilangnya minat generasi muda kurang untuk melakukan pekerjaan di bidang pertanian serta dampak lingkungan diantaranya berupa rusaknya saluran irigasi (Sihaloho, 2004).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian terkait perubahan penggunaan tanah di lokasi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api dan juga perubahan penggunaan tanah di sekitar lokasi tersebut. Selain itu peneliti juga akan mengkaji mengenai dampak sosial yang dirasakan masyarakat terdampak langsung terhadap pengadaan tanah di lokasi pembangunan gudang kereta api. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu **“Dampak Perubahan Penggunaan Tanah Dan Kondisi Sosial Masyarakat Akibat Pengadaan Tanah (Studi Kasus Pembangunan**

Infrastruktur Sarana dan Prasarana Kereta Api di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru)”. Rilau Kabupaten Barru)”.

B. Rumusan Masalah

Kegiatan pengadaan tanah untuk infrastruktur transportasi akan selalu berpengaruh terhadap perubahan penggunaan tanah yang berada di sekitar daerah pembangunan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api akan memicu perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian yang berada di sekitar daerah pengadaan tanah sehingga mengakibatkan penurunan jumlah luasan lahan pertanian di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

Adanya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana juga akan mempengaruhi kondisi sosial masyarakat yang terdampak. Masyarakat terdampak ini meliputi petani penggarap yang kehilangan lapangan pekerjaan. Hal ini membuat petani kehilangan lapangan pekerjaan dan harus mencari mata pencaharian yang lain. Sedangkan bagi tanah-tanah yang berada di sekitar lokasi pembangunan, akan berdampak pada harga tanah yang meningkat berkali kali lipat.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis seberapa besar alih fungsi lahan yang terjadi pada daerah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api dan daerah sekitarnya di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi pembangunan rel kereta api dan gudang. Disamping itu juga melihat dampak sosial yang dirasakan masyarakat terdampak pengadaan tanah di lokasi pembangunan gudang kereta api. Adapun batasan masalah yang dimaksud meliputi:

1. Analisis perubahan penggunaan tanah dan dampak perubahan penggunaan tanah pada daerah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api dan daerah sekitarnya di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

2. Kondisi sosial masyarakat terdampak pengadaan tanah di lokasi pembangunan gudang kereta api di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Memetakan perubahan penggunaan tanah dan yang terjadi dan dampak perubahan penggunaan tanah pada daerah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api dan daerah sekitarnya di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru
 - b. Mengetahui kondisi sosial masyarakat yang terdampak pengadaan tanah di lokasi pembangunan gudang kereta api di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru
- ##### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perubahan penggunaan lahan yang terjadi di sekitar daerah pengadaan tanah dampak sosial bagi masyarakat yang terdampak.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan tim pengadaan tanah dalam merumuskan kebijakan untuk menekan perubahan penggunaan tanah di lahan pertanian.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api berdampak pada perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Tanete Rilau. Penggunaan lahan yang paling tinggi mengalami perubahan yakni lahan pertanian yakni sawah yang mengalami penurunan luas hingga 37,77 Ha dan tegalan seluas 12,40 Ha. Pembangunan rel kereta api dibangun diatas lahan sawah seluas 34,97 Ha, tegalan seluas 12,40 Ha dan gunung batu seluas 1,41 Ha. Sedangkan pembangunan gudang kereta api dibangun diatas lahan sawah seluas 2,80 Ha. Sedangkan untuk perubahan penggunaan tanah di sekitar daerah pembangunan sampai saat ini belum ada perubahan.
2. Dampak yang dirasakan masyarakat dari adanya pembangunan adalah seringkali terjadi banjir yang mengakibatkan petani gagal panen, rusaknya rumah warga akibat pembangunan di daerah gunung batu dan harga ganti rugi untuk pengadaan tanah infrastruktur sarana dan prasarana kereta api mempengaruhi harga tanah yang berada disekitarnya.
3. Dampak sosial yang dirasakan petani penggarap adalah berkurangnya lahan garapan hingga kehilangan pekerjaan, seringkali terjadi banjir yang mengakibatkan gagal panen dan susah nya akses ke sawah-sawah yang berada di sekitar daerah pembangunan gudang kereta karena tidak adanya akses jalan. Hal ini membuat biaya untuk menggarap sawah menjadi lebih meningkat.

B. Saran

1. Pemerintah Desa/Kelurahan dapat mengajukan surat ke pihak pengelola pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api terkait pembangunan saluran irigasi agar tidak lagi terjadi banjir di sekitar area

pembangunan yang mengakibatkan gagal panen dan terendamnya jalan desa.

2. Mengusulkan kepada pihak pengelola infrastruktur sarana dan prasarana kereta api agar dapat menggandeng tenaga kerja lokal sehingga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di Kecamatan Tanete Rilau. Dengan demikian pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S 2013, *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Berry, D 2003, *Pokok-pokok pikiran dalam sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Burdge, RJ 1998, *A conceptual approach to social impact assesment (revised edition)*, Social Ecology Press, United States Of America
- Dalyono 2005, *Psikologi Pendidikan*. Rineka Cipta Gerungan, Jakarta.
- Darwis, SJ 2020, 'Perubahan Sosial Masyarakat Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru Akibat Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare', Tesis pada Universitas Negeri Semarang
- Dewi, NLGMP & Salim, MN 2020, *Berakhir di Temon perdebatan panjang pengadaan tanah untuk [new] yogyakarta internasional airport (YIA)*, STPN Press, Yogyakarta.
- Handayani, dkk 2016, 'Dampak Pembebasan Lahan Pertanian Untuk Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (SUMO) Terhadap Kualitas Hidup Petani Bekas Pemilik Lahan di Sumberwaru, Wiringanom-Gresik', *Jurnal Berkala Ilmiah Agribisnis Agridevina*, vol. 5, no.2
- Harsono, B 1999, '*Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*', Djambatan, Jakarta.
- Lestari, D 2019, 'Dampak Sosial Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi PLTB di Binamu Jeneponto', *TEBAR SCIENCE: Jurnal Kajian Sosial dan Budaya*, vol.3, hal.31-41.
- Marlianawati, F., Setyowati, D. L., & Martitah. 2019, 'Social Change in Farming Community to The Development of West Java Internasional in Sukamulya Village', *Journal of Educaation Social Studies*, vol. 8, no.2

- Martanto, R 2019, *Analisis pola perubahan penggunaan lahan untuk stabilitas swasembada beras di Kabupaten Sukoharjo*, STPN Press, Yogyakarta.
- Masykuroh, DK., Rudianto, I 2016, 'Kajian Perubahan Penggunaan Lahan dan Harga Lahan Di Wilayah Sekitar Pintu Tol Ungaran', *Jurnal Tata Loka*, vol. 18, no. 1.
- Miswanto, & Safaat, M 2018, 'Dampak Pembangunan Industri Pariwisata terhadap Alih Fungsi Lahan (Studi Tentang Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau)', *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, vol. 20, no. 1.
- Muiz, A 2009, 'Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukabumi', Tesis pada Institut Pertanian Bogor.
- Niandyti, F 2018, 'Dampak Pembangunan Industri Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah dan Kesesuaiannya Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Nugroho, A 2015, *Metode penelitian kualitatif*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Rinandar, NM 2019, 'Dampak Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Risnawati, K 2011, 'Analisis Pengaruh Keberadaan Jalan Hertasning Baru Terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa'. *Jurnal Arsitektur, Kota dan Permukiman (LOSARI)*.
- Ritohardoyo, S 2002, *Penggunaan dan tata guna lahan*, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Sarwono, J 2006, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Saputro, QSD 2018, 'Kondisi Soaial Ekonomi Masyarakat Yang Berhak Atas Objek Pengadaan Tanah Pembangunan *Yogyakarta International*
- Sihalolo 2004, 'Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria', Tesis pada Institut Pertanian Bogor.
- Sitorus, O., & Limbong, D 2004, *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum*, Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia, Yogyakarta.
- Soekanto, S 2015, *Sosiologi Keluarga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono 2017, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono 2019, *Metode penelitian dan pengembangan riset and development*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Suryono, A 2020, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tambajong, J., Mononimbar, W., Lahamendu, V 2016, 'Identifikasi Perubahan Penggunaan Lahan Koridor Jalan Trans Suawesi Di Amurang', *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, vol. 4, no.3.
- Wahid, Y 2016, *Pengantar hukum tata ruang*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Widayanti, R 2010, 'Formulasi Model Pengaruh Perubahan Tata Guna Lahan Terhadap Angkutan Kota di Depok', *Jurnal Tata Guna Lahan*.
- Zakie, M 2013, *Kewenangan negara dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum di Indonesia dan Malaysia*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Perundang Undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun
2014 jo. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 jo. Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 jo. Peraturan Presiden Nomor
148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.